



Judul : Genjot kualitas polisi, DPR minta perbaiki pendidikan Bintara
Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Genjot Kualitas Polisi DPR Minta Perbaiki Pendidikan Bintara

ANGGOTA Komisi III DPR Adang Daradjatun menyoroti pendidikan bintangara polisi yang hanya 5 bulan. Durasi itu dinilai terlalu singkat untuk memben-tuk kualitas personel kepoli-sian. Mereka dikhawatirkan tidak memiliki keahlian khusus di luar kemampuan fisik dasar seperti hormat, baris, dan lari.

Padahal, bintangara merupakan tulang punggung institusi ke-polisian sehingga kualitas pen-didikannya harus diperkuat. "Kami meminta kepada Lem-baga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri untuk mem-perpanjang masa pendidikan Bintangara Polri." ucap Adang dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Adang mendukung perminta-an tambahan anggaran bagi Polri, terutama untuk menun-jang peningkatan kualitas pen-didikan anggota. Hal ini agar reformasi Polri tidak hanya soal perubahan struktur dan instru-men, tetapi juga menyangkut aspek kultur yang dinilai men-jadi faktor kunci.

Selain itu, ia mendorong pendidikan polisi spesialis usai mereka lulus bintangara, seperti pendidikan intelijen atau re-serse. Karena, pendidikan lan-jutan yang spesifik penting un-tuk meningkatkan kompetensi personel di lapangan.

Ia khawatir, hilangnya spesi-alisasi ini akan berujung pada banyaknya kasus penyimpangan prosedur di lapangan karena kurangnya pemahaman hu-kum dan teknis penyidikan. "Para pemeriksa, penyidik di lapangan yang hanya keluar dari pendidikan mungkin masuk menjadi pemeriksa, dia tidak tahu gimana proses penyidik-an," imbuh politikus PKS ini.

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan, lembaga pen-didikan Polri memegang peran strategis dalam menentukan kualitas institusi ke depan. Karena itu, pembenahan sistem pendidikan di lingkungan Polri sebagai fondasi utama pemben-tukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas.

"Komisi III DPR pada prin-sipnya selalu mendukung ke-butuhan anggaran Polri, termasuk untuk sektor pendidikan, selama direncanakan dengan baik dan tepat sasaran," ujar Habib Aboe dalam keterangan-nya, Minggu (5/4/3026).

Dia menyoroti adanya ke-senjangan antara kualitas pen-didikan dengan realita perilaku anggota Polri di lapangan. Fak-tanya, sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 9.817 kasus pelanggaran kode etik dan di-siplin anggota Polri. "Angka ini sangat signifikan. Karena rata-rata plus minus 27 kasus per hari. Ini bukan angka kecil," sebut dia.

Selain itu, ia mendorong pe-nguatan materi kemanusiaan dalam pendidikan kepolisian. Harapannya agar mereka tidak hanya profesional, tetapi juga berempati terhadap masyarakat.

Ia juga menyinggung kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri, termasuk di satuan nar-koba. Karena itu, harus ada benteng yang kuat bagi an-ggota yang ada lembaga bhay-angkara itu. "Kami meminta adanya kurikulum khusus dan pengawasan ketat sela-ma masa pendidikan untuk mencegah penyimpangan ter-sebut," harap dia. ■ TIF